

**PENGARUH PERILAKU PEMILIH TERHADAP PARTISIPASI POLITIK
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA KOTA PAGARALAM
PUTARAN KEDUA**

(Studi Perilaku Pemilih Di Kecamatan Pagaram Utara)



SKRIPSI

Oleh :

MUHAMMAD IKSAN
D1E009093

**JURUSAN ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BENGKULU
2014**

MOTTO dan PERSEMBAHAN

Motto

Tuntutan yang membuat diri harus terus berjuang menjalani hidup ini

karena orang disekitar menunggu hasil dari perjuangan ini

Persembahan

Syukur Alhamdulillah... Skripsi ini ku persembahkan untuk:

❖ **Allah SWT, Yang Maha Besar Lagi Maha SegalaNya. Terima kasih atas semua nikmat dan rahmat-Mu yang agung ini, hanya kepada Mu tempat hamba curahkan resah hati ini, tempat hamba meminta petunjuk agar terus melangkah berusaha dan berdo'a tanpa mengenal putus asa.**

❖ **Papa ku "Wazir Hasan" yang sangat berarti di dalam hidup ku tanpa bisa ku ungkapkan dengan kata-kata.**

❖ **Almarhuma Mama ku "Ermawati" mama, umur ihsan baru enam hari mama telah meninggalkan ihsan, seumur hidup ihsan tidak akan pernah bertemu mama tapi mama akan selalu hidup di hati ihsan, di hati seorang anak yang selalu mengidam-idamkan kasih sayang dan cinta seorang mama.**

❖ **Papa "Herman", Amak "Erdawati" dan Almarhuma Nenek "Maimunah" yang telah membesarkan ku dengan penuh kesabaran, ketulusan dan kasih sayang.**

❖ **Ibuk "zulmaida" terima kasih banyak bu**

❖ **Saudara-saudari ku tercinta yang selalu mendoakan yang terbaik untuk ku dan memberi ku banyak bantuan.**

❖ **Nurhayati, S.KM (Cii) terima kasih atas kesabaran dan ketulusanmu**

❖ **Keluarga besar yang selalu mendoakan, memberikan semangat agar tetap kuat dan terus berjuang.**

❖ **Keponakan ku yang antikkkkkk inyanann "Taqiyyah" Pakcik rindu...**

❖ **Almamaterku**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Iksan
NPM : D1E009093
Jurusan : Ilmu Komunikasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Pengaruh Perilaku Pemilih Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota Kota Pagaralam Putaran Kedua (Studi Perilaku Pemilih Di Kecamatan Pagaralam Utara)

Adalah bukan skripsi orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya dengan benar. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2014



Muhammad Iksan

RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Pribadi



Nama : Muhammad Iksan
Tempat/Tanggal Lahir : Pagaram, 24 Juni 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Anak ke : 4 dari 4 bersaudara
Alamat : Jl. Kalimantan No. 41
Rawa Makmur,
Bengkulu

Orang Tua
Ayah : Wazir Hasan
Ibu : Ermawati (Almh)
Saudara : Yahdi
Yahya
Yemmi

II. Pendidikan

1. Tahun 1997 tamat Taman Kanak-Kanak Aisyiah Bustanul Athfal Kota Pagaram
2. Tahun 2003 tamat SD Muhammadiyah 3 Kota Pagaram
3. Tahun 2006 tamat SMP NEGERI 2 Kota Pagaram
4. Tahun 2009 tamat SMK Muhammadiyah Kota Pagaram
5. Tahun 2009 diterima di Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UNIB melalui jalur SNMPTN

III. Pengalaman Organisasi dan Kegiatan

1. Peserta pada kegiatan PKK (Pengenalan Kehidupan Kampus) UNIB tahun 2009
2. Peserta Masa Perkenalan Mahasiswa Baru (MAPAWARU) 2009
3. Peserta Welcome To Communication (WTC) tahun 2009
4. Peserta Kemah Orientasi Mahasiswa dan Pengembangan Komunikasi (KOMPAK) tahun 2009

5. Peserta Pelatihan Manajemen Organisasi (PMO) tanggal 4-6 Desember 2009
6. Panitia dan Peserta Badan Jurnalistik kegiatan pelatihan *Jurnalist Expose* (Pelatihan Produksi Berita Radio) tanggal 19-20 Desember 2009
7. Panitia Liga Komunikasi (LigaKom) tahun 2009
8. Panitia Welcome To Communication (WTC) tahun 2010
9. Panitia Pelatihan Manajemen Organisasi (PMO) tahun 2010
10. Peserta Seminar Nasional Dengan Tema “Pendidikan Sex Untuk Anak, Remaja, Orang tua” tanggal 28 Februari 2010
11. Peserta Seminar Nasional dengan tema “Derita Hidup Di Negeri Para Koruptor” tanggal 23 Februari 2011
12. Peserta KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara pada 2 Juli – 31 Agustus 2012
13. Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu pada tanggal 17 September – 20 November 2012

ABSTRAK

PENGARUH PERILAKU PEMILIH TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA KOTA PAGARALAM PUTARAN KEDUA

(Studi Perilaku Pemilih Di Kecamatan Pagaralam Utara)

MUHAMMAD IKSAN

D1E009093

Pemilihan Walikota Kota Pagaralam terjadi dua putaran, berkurangnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota dari hasil perolehan suara putaran pertama ke putaran kedua dan adanya perubahan perilaku pemilih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perilaku pemilih meliputi variabel pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, pendekatan rasional dan pendekatan iklan kampanye di media cetak terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota Pagaralam putaran kedua. Metode yang digunakan adalah kuantitatif, teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan 100 responden. Analisis regresi menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan Uji F untuk menguji perilaku pemilih secara simultan dan Uji T untuk menguji pengaruh setiap variabel independent. Dari hasil uji statistik dapat disimpulkan bahwa variabel perilaku pemilih terdiri dari pendekatan sosiologis, psikologis, rasional dan iklan kampanye di media cetak secara simultan (Uji F) memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota Pagaralam putaran kedua, artinya keseluruhan pendekatan perilaku pemilih mempengaruhi berkurangnya partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Pagaralam Utara. Sedangkan secara parsial (Uji T) hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dari keempat pendekatan variabel perilaku pemilih, ternyata pendekatan sosiologis ($T_{hitung} = 1,921$), pendekatan psikologis ($T_{hitung} = 1,721$), pendekatan rasional ($T_{hitung} = 2,934$), pendekatan iklan kampanye di media cetak ($T_{hitung} = 1,776$) dikonsultasikan dengan $T_{tabel} = 1,985$. Jadi dapat disimpulkan bahwa perilaku pemilih pendekatan rasional secara parsial (Uji T) memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota putaran kedua, artinya secara parsial pendekatan rasional mempengaruhi berkurangnya partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Pagaralam Utara pada pemilihan Walikota putaran kedua.

Kata kunci: perilaku pemilih, pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, pendekatan rasional, pendekatan iklan kampanye media cetak, partisipasi Politik

ABSTRACT

VOTING BEHAVIOR INFLUENCE OF POLITICAL PARTICIPATION SOCIETY IN THE CITY MAYOR ELECTION PAGARALAM SECOND ROUND (Study of Voting Behavior In District North Pagaram)

MUHAMMAD IKSAN
D1E009093

Elections of the mayor Pagaram city occurred two rounds, reduced public political participation in the selection of the mayor's first round of voting results for the second round and a change in voting behavior. This study aims to determine the effect of voting behavior variables include sociological approaches, psychological approaches, rational approach and the approach in print media advertising campaigns to political participation of the people in the second round of the election of Mayor Pagaram. The method used is quantitative, techniques of data collection using a questionnaire with 100 respondents. Regression analysis using multiple linear regression using the F test to test the behavior of voters simultaneously and T test to test the effect of each independent variable. From the results of statistical tests it can be concluded that the voting behavior variables consist of sociological approaches, psychological, rational and advertising campaigns in print media simultaneously (Test F) has a significant influence on the political participation of the people in the election of Mayor Pagaram second round, meaning that the overall approach to influence voter behavior reduced political participation of society in the District of North Pagaram. While partially (Test T) results of the study showed that of the four approaches voting behavior variables, it turns sociological approach ($T_{\text{count}} = 1.921$), psychological approach ($T_{\text{count}} = 1.721$), rational approach ($T_{\text{count}} = 2.934$), approach to advertising campaigns in print ($T_{\text{count}} = 1.776$) in consultation with the $T_{\text{table}} = 1.985$. So it can be concluded that voter behavior is partially rational approach (Test T) has a significant influence on the community of political participation in the selection of the second round of the Mayor, that is partially reduced rational approach affect the political participation of society in the District of North Pagaram Mayor election second round.

Keywords: voting behavior, sociological approaches, psychological approaches, rational approach, approach print media advertising campaign, political participation

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT dengan segala nikmat dan hidayah dari Allah terutama nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat akhir kelulusan. Kemudian shalawat beserta salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman hidup yakni Al-qur'an dan sunnah untuk keselamatan umat di dunia.

Skripsi ini berjudul Pengaruh Perilaku Pemilih Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota Kota Pagar Alam Putaran Kedua (Studi Perilaku Pemilih Di Kecamatan Pagaralam Utara). Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidaklah sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Tak lupa juga penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis selama proses pembuatan skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Drs. Hasan Pribadi, Ph.D, selaku Dekan Fisip Universitas Bengkulu.
2. Bapak Dwi Aji Budiman, S.Sos, M.A, selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Bengkulu.
3. Bapak Dr. Machyudin Agung Harahap, M.Si selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan banyak pengalaman hidup selama masa kuliah ini
4. Bapak Drs. Lamhir Syam Sinaga, M.Si selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan saran dan masukan sehingga selesainya penulisan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Azhar Marwan, M.Si selaku pembahas seminar proposal dan penguji skripsi, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas masukannya
6. Bapak Drs. Khairil Budani, M.Si selaku pembahas seminar proposal dan penguji skripsi, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas masukannya
7. Seluruh Dosen dan Staff Jurusan Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Bengkulu yang memberikan pelayanan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Masyarakat Kota Pagaralam Kecamatan Pagaralam Utara yang telah terlibat di dalam proses pembuatan skripsi ini khususnya yang telah menjadi responden.

9. Teman-teman seperjuangan dwi, ali, andra, yan, abdur, zikri, aidil, candra, robert, yang telah banyak memberikan doa dan dukungan, serta seseorang yang selalu mengingatkan ku dengan kata-kata “semua kan indah pada waktu-Nya”, tidak lupa seluruh teman-teman angkatan 2009 Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang tak bisa disebutkan satu per satu, kalian adalah bagian dari cerita perjalanan hidup ku.

Semoga segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis diridoi Allah SWT (amin). Sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah dan khilaf, dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam ilmu pengetahuan.

Bengkulu, Februari 2014

Penulis

Muhammad Iksan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
 Bab I Pendahuluan.....	 1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Batasan Penelitian	5
1.5 Kegunaan Penelitian.....	6
 Bab II Tinjauan Pustaka	 7
II.1 Penelitian Terdahulu.....	7
II.2 Kerangka Teori	8
II.2.1 Perilaku Pemilih (Voting Behavior).....	8
II.2.2 Pendekatan Sosiologis	10
II.2.3 Pendekatan Psikologis.....	11
II.2.4 Pendekatan Rasional.....	12
II.2.5 Pendekatan Iklan Kampanye Di Media Cetak	12
II.2.5.1 Model Lasswell.....	14
II.3 Pemilihan Umum.....	14

II.3.1 Pengertian Pemilihan Umum.....	14
II.3.2 Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	15
II.3.3 Asas-Asas Pemilihan Umum.....	15
II.3.4 Sistem Pemilihan Umum.....	16
II.4 Perilaku Politik	17
II.4.1 Pengertian Perilaku Politik.....	17
II.4.2 Bentuk-Bentuk Perilaku Politik	19
II.4.2.1 Kampanye	19
II.4.2.2 Memberikan Hak Suara	23
II.4.2.3 Mengawasi penentuan pemenang didalam Pemilihan Umum Kepala Daerah	24
II.5 Partisipasi Politik.....	27
II.5.1 Pengertian Partisipasi Politik	27
II.5.2 Kategori, Bentuk dan Tingkat Partisipasi Politik.....	28
II.6 Hipotesis Penelitian	30
II.7 Kerangka Pemikiran	32
Bab III Metodologi Penelitian.....	33
III.1 Tipe Penelitian	33
III.2 Variabel Penelitian.....	33
III.3 Definisi Konseptual.....	34
III.4 Definisi Operasional	35
III.5 Populasi Dan Sampel	36
III.5.1 Populasi.....	36
III.5.2 Sampel	37
III.6 Teknik Sampling	37
III.7 Kriteria Pengukuran dan Skoring.....	38
III.8 Teknik Pengumpulan data.....	41
III.9 Analisis Data	42
Bab IV Deskripsi Wilayah Penelitian	45
IV.1 Kota Pagaralam.....	45
IV.2 Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.....	47

IV.2.1 Nama – Nama Kelurahan di Kecamatan Pagar Alam Utara	47
IV.2.2 Daftar Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kecamatan Pagaralam Utara	47
IV.2.3 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kecamatan Pagaralam Utara	48
Bab V Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	49
V.1 Hasil Penelitian	49
V.1.1 Karakteristik Responden	49
V.1.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	49
V.1.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	50
V.1.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Agama	50
V.1.1.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan.....	51
V.1.1.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	51
V.1.2 Hasil Data Perilaku Pemilih Pendekatan Sosiologis (X_1), Psikologis (X_2), Rasional (X_3) dan Iklan Kampanye di Media Cetak (X_4).....	52
V.1.2.1 Pendekatan Sosiologis (X_1)	52
V.1.2.2 Pendekatan Psikologis (X_2)	54
V.1.2.3 Pendekatan Rasional (X_3).....	55
V.1.2.4 Pendekatan Iklan Kampanye di Media Cetak (X_4).....	57
V.1.3 Pernyataan Responden terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota Pagaralam Putaran Kedua (Y)	59
V.1.3.1 Pernyataan Responden Terhadap Partisipasi Politik	59
V.1.4 Hasil Analisis Data.....	64
V.1.4.1 Pengaruh Variabel Perilaku Pemilih Pendekatan Sosiologis Terhadap Partisipasi Politik.....	69
V.1.4.2 Pengaruh Variabel Perilaku Pemilih Pendekatan Psikologis Terhadap Partisipasi Politik.....	69
V.1.4.3 Pengaruh Variabel Perilaku Pemilih Pendekatan Rasional Terhadap Partisipasi Politik.....	70
V.1.4.4 Pengaruh Variabel Perilaku Pemilih Pendekatan Iklan Kampanye Di Media Cetak Terhadap Partisipasi Politik	71

V.2 Pembahasan	72
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	76
VI.1 Kesimpulan	76
VI.2 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagaram periode 2013-2018
2. Tabel 1.2 Perolehan Suara Pemilihan Walikota Pagaram
3. Tabel 1.3 Perolehan Suara Pemilihan Walikota Pagaram Putaran Kedua
4. Tabel 4.1 Daftar Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kecamatan Pagaram Utara
5. Tabel 4.2 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kecamatan Pagaram Utara
6. Tabel 5.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
7. Tabel 5.2 Responden Berdasarkan Umur
8. Tabel 5.3 Responden Berdasarkan Agama
9. Tabel 5.4 Responden Berdasarkan Pendidikan
10. Tabel 5.5 Responden Berdasarkan Pekerjaan
11. Tabel 5.6 Pernyataan responden terhadap memilih calon Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Agama yang sama
12. Tabel 5.7 Pernyataan responden terhadap memilih calon Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan daerah asal yang sama
13. Tabel 5.8 Pernyataan responden terhadap memilih calon Walikota dikarenakan adanya hubungan kekerabatan/kedekatan dengan calon
14. Tabel 5.9 Pernyataan responden terhadap pandangan keluarga dalam memilih calon atau partai yang sama
15. Tabel 5.10 Pernyataan responden terhadap calon Walikota dan Wakil Walikota yang memberi keuntungan menjadi faktor untuk menentukan pilihan
16. Tabel 5.11 Pernyataan responden terhadap visi dan misi serta program yang ditawarkan oleh para calon menjadi faktor menentukan pilihan
17. Tabel 5.12 Pernyataan responden terhadap melihat dan membaca iklan kampanye para calon di Media Cetak Koran
18. Tabel 5.13 Pernyataan responden terhadap memilih calon walikota berdasarkan iklan kampanye para calon yang ada di media cetak koran
19. Tabel 5.14 Pernyataan responden terhadap berpartisipasi atas kesadaran sebagai masyarakat Kota Pagaram

- 20. Tabel 5.15 Pernyataan responden terhadap golongan putih (golput)
- 21. Tabel 5.16 Pernyataan responden terhadap perubahan lebih baik
- 22. Tabel 5.17 Pernyataan responden terhadap kewajiban sebagai warga negara
- 23. Tabel 5.18 Pernyataan responden terhadap ikut serta melakukan penilaian kampanye
- 24. Tabel 5.19 Pernyataan responden terhadap menggunakan hak pilih tanpa mendapat imbalan
- 25. Tabel 5.20 Pernyataan responden terhadap menggunakan hak pilih putaran pertama atas kesadaran sendiri tanpa ada paksaan
- 26. Tabel 5.21 Pernyataan Penilaian responden terhadap menggunakan hak pilih putaran kedua atas kesadaran sendiri tanpa ada paksaan
- 27. Tabel 5.22 *Descriptive Statistics*
- 28. Tabel 5.23 *Correlations*
- 29. Tabel 5.24 *Model Summary*
- 30. Tabel 5.25 *Anova*
- 31. Tabel 5.26 *Coefficients*

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1 Model Lasswell
2. Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran
3. Gambar 4.1 Peta Kota Pagaram

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat rekomendasi penelitian dari jurusan Ilmu Komunikasi
2. Surat izin penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Surat izin penelitian dari KP2T Provinsi Bengkulu
4. Surat izin penelitian dari Badan Kesbangpol Kota Pagaralam
5. Surat izin penelitian dari kantor Kecamatan Pagaralam Utara
6. Lembar Kuesioner Penelitian
7. Tabulasi skor dari kuesioner penelitian dan informasi lainnya
8. Analisis Regresi Linier Berganda dengan SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*)
9. Tabulasi data variabel penelitian
10. Tabel Titik Persentase Distribusi F dan T
11. Foto serta Visi dan Misi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pagaralam periode 2013-2018
12. Foto serta Visi dan Misi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pagaralam periode 2013-2018 Putaran Kedua
13. Iklan Kampanye Di Media Cetak Koran Pagaralam Pos Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pagaralam Putaran Kedua
14. Foto Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 2008). Pemilihan umum merupakan sarana masyarakat atau individu berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial atau perjanjian masyarakat antara partai politik dan kandidat yang mencalonkan diri yang menjadi peserta pemilihan umum (visi dan misi) dengan rakyat yang memiliki hak pilih, yang dilakukan partai melalui aktivitas politik meliputi kampanye, iklan politik media massa cetak (koran), audio (radio), audio visual (televisi) serta media lainnya seperti poster-poster, spanduk, itu semua berisi janji politik guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihan. Didalam masa pemilihan sering terjadi persaingan bahkan konflik dan kisruh antar partai politik ataupun para kandidat yang mencalonkan diri dan pendukungnya sehingga ada yang sampai pada pelanggaran pidana.

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dijelaskan dalam UU Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 4 berbunyi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Pelaksanaan Pemilihan Walikota Kota Pagaralam tahun 2013 merupakan pemilihan Walikota yang baru dilakukan dua kali karena Kota Pagaralam sendiri baru 12 tahun menjadi kota, sebelumnya Kota Pagaralam masuk di dalam wilayah Kabupaten Lahat.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah atau Walikota Kota Pagaralam periode 2013-2018 yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2013 diikuti oleh 9 kandidat yang telah lolos verifikasi yang dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Pasangan Walikota/Wakil Walikota Pagaralam periode 2013-2018

No. Urut	Pasangan Calon (Walikota / Wakil Walikota)
1	H. Suharindi SJ, S.Pd. MM / Hariadi Razak, ST. MM
2	Hj. Ida Fitriati / Novirzah
3	H. Muchtar Effendi, SH / Drs. H. Kusaimi Yatip, MM
4	Rita Lismiati / Taba Iskandar
5	Drs. H. Sukadi Duadji, MM / Musridi Muis. SH. M.Si
6	Drs. H. A. Fachri, MM / D. Sastra Negara, SH
7	H. Arudji Kartawinata, SE / Ir. Rasidi Burhanan
8	H. Sofyan Djamal, SH. MH / Alpian Maskoni, SH
9	Dra. Hj. Septiana Zuraida, SH.M.Si / Ir. H. Bambang Hermanto, MM

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Kota Pagaralam, Pemilihan Walikota Pagaralam periode 2013-2018 ini terdaftar 98.368 orang sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah memenuhi persyaratan dengan jumlah 353 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar pada 5 Kecamatan di Kota Pagaralam. Adapun rincian tempat pemungutan suara (TPS) sebagai berikut: 1) Kecamatan Pagaralam Utara 92 TPS, 2) Kecamatan Pagaralam Selatan 119 TPS, 3) Kecamatan Dempo Utara 57 TPS, 4) Kecamatan Dempo Tengah 41 TPS, 5) Kecamatan Dempo Selatan 44 TPS.

Pada Tanggal 23 Januari 2013 masyarakat Kota Pagaralam yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap memberikan hak pilihnya dalam Pemilihan Walikota Kota Pagaralam mulai pukul 08.00-14.00 WIB. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum Kota Pagaralam, Pemilihan Walikota yang diikuti 9 pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota ini perolehan suara nya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2 Perolehan Suara Pemilihan Walikota Kota Pagaram

No. Urut	Pasangan Calon (Walikota / Wakil Walikota)	Suara	%
1	H. Suharindi SJ, S.Pd. MM / Hariadi Razak, ST. MM	11.478	14,62
2	Hj. Ida Fitriati / Novirzah	16.936	21,57
3	H. Muchtar Effendi, SH / Drs. H. Kusaimi Yatip, MM	5.468	6,96
4	Rita Lismiati / Taba Iskandar	1.344	1,71
5	Drs. H. Sukadi Duadji, MM / Musridi Muis. SH. M.Si	8.094	10,31
6	Drs. H. A. Fachri, MM / D. Sastra Negara, SH	2.619	3,34
7	H. Arudji Kartawinata, SE / Ir. Rasidi Burhanan	1.304	1,66
8	H. Sofyan Djamal, SH. MH / Alpian Maskoni, SH	16.360	20,83
9	Dra. Hj. Septiana Zuraida, SH.M.Si / Ir. H. Bambang Hermanto, MM	14.920	19,00
	Total	78.523	100

Dari hasil perolehan suara pemilihan Walikota putaran pertama mencapai 78.523 suara persentase 79,83%, sedangkan yang tidak menggunakan hak pilih 19.845 suara persentase 20,17%, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Pagaram menetapkan pemilihan Walikota berlangsung dua putaran, karena dari dua pasang calon yang memperoleh suara terbanyak belum mencapai 25% suara pada pemilihan Walikota putaran pertama sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Pada putaran kedua kandidat maju adalah pasangan nomor urut 2 yaitu pasangan Hj. Ida Fitriati - Novirzah dan pasangan nomor urut 8 yaitu H. Sofyan Jamal, SH.MH - Alpian Maskoni, SH.

Pada Pemilihan Walikota putaran kedua rekapitulasi jumlah pemilih tetap yang sebelumnya di putaran pertama berjumlah 98.368, di putaran kedua menjadi 99.858 bertambah 1.490 dikarenakan pada putaran kedua dilakukan rekapitulasi ulang jumlah pemilih tetap disetiap kecamatan. Pemilihan Walikota Pagaram putaran kedua dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2013.

Tabel 1.3 Perolehan Suara Pilwakot Kota Pagaram Putaran Kedua

No. Urut	Pasangan Calon (Walikota / Wakil Walikota)	Suara	%
2	Hj. Ida Fitriati / Novirzah	40.261	53,24
8	H. Sofyan Djamal, SH. MH / Alpian Maskoni, SH	35.258	46,76
	Total	75.619	100

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Walikota Pagaram putaran kedua sebanyak 99.858, hasil perolehan suara mencapai 75.619 suara dengan persentase 75,73%, sedangkan yang tidak menggunakan hak pilih serta suara tidak sah berjumlah 24.239 suara persentase 24,27%.

Dari sumber media cetak koran daerah Pagaram Pos pada hari Sabtu 13 April 2013 Komisi Pemilihan Umum Kota Pagaram resmi tetapkan Walikota dan Wakil Walikota terpilih yaitu pasangan nomor urut 2 Hj. Ida Fitriati dan Novirzah sebagai pasangan calon terpilih. Keputusan penetapan dikeluarkan melalui proses rapat pleno secara tertutup, bertempat di kantor KPU Pagaram, dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 April sekitar pukul 11.00 Wib.

Peneliti tertarik untuk mengambil judul tentang Pengaruh Perilaku Pemilih Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota Kota Pagaram Putaran Kedua Studi Perilaku Pemilih Di Kecamatan Pagaram Utara. Pemilihan Walikota Kota Pagaram terjadi dua putaran, berkurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan Walikota dari hasil perolehan suara putaran pertama ke putaran kedua dan adanya perubahan perilaku pemilih dalam pada putaran kedua dalam memilih kandidat yang akan menjadi Walikota dan Wakil Walikota Pagaram, pemilih yang memilih kandidatnya yang kalah pada putaran pertama harus berganti pilihan pada putaran kedua. Lokasi penelitian akan dilakukan di Kecamatan Pagaram Utara Kota Pagaram, keikutsertaan masyarakat didalam Pemilihan Walikota Pagaram putaran kedua pada tanggal 30 Maret 2013 yang lalu merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin Kota Pagaram untuk lima tahun mendatang.

Pada pelaksanaan Pemilihan Walikota Kota Pagaralam putaran pertama masyarakat Kecamatan Pagaralam Utara yang tidak menggunakan hak pilihnya atau kurangnya pemilih yang berpartisipasi dalam Pemilihan Walikota berjumlah 6.641 suara persentase 23,06%. Sedangkan pada putaran kedua, di Kecamatan Pagaralam Utara terjadi peningkatan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya atau semakin berkurangnya pemilih dalam berpartisipasi Pemilihan Walikota putaran kedua berjumlah 7.954 suara persentase 27,11%.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengangkat judul “Pengaruh Perilaku Pemilih Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota Kota Pagaralam Putaran Kedua (Studi Perilaku Pemilih di Kecamatan Pagaralam Utara)”.

I.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah berkurangnya partisipasi politik masyarakat Kecamatan Pagaralam Utara dalam pemilihan Walikota Kota Pagaralam putaran kedua, dilihat dari berkurangnya total perolehan suara putaran kedua. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana perilaku pemilih dengan empat pendekatan yaitu sosiologis, psikologis, rasional dan iklan kampanye di media cetak mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak suaranya di Kecamatan Pagaralam Utara Kota Pagaralam dalam Pemilihan Walikota Kota Pagaralam pada putaran kedua.

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui pengaruh perilaku pemilih dengan empat pendekatan yaitu sosiologis, psikologis, rasional dan iklan kampanye di media cetak yang menyebabkan berkurangnya partisipasi politik masyarakat di kecamatan Pagaralam Utara pada Pemilihan Walikota Kota Pagaralam putaran kedua.

I.4 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menganggap perlu adanya batasan penelitian yang bertujuan akan mempermudah baik peneliti maupun pembaca dalam memahami masalah yang dibahas. Untuk memperjelas dan membatasi penelitian

ini, maka penulis membuat batasan penelitian masalah yaitu batasan masalah berupa studi perilaku pemilih, perilaku politik dan partisipasi politik di Kota Pagaralam Kecamatan Pagaralam Utara.

I.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan terhadap permasalahan yang diteliti tentang perilaku pemilih, perilaku politik dan partisipasi politik dalam ilmu pengetahuan di bidang ilmu komunikasi politik;
2. Penelitian ini diharapkan memperluas pengetahuan di bidang ilmu komunikasi khususnya komunikasi politik, terutama sebagai pembelajaran dan memberikan informasi mengenai perilaku pemilih dengan partisipasi masyarakat.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperluas dan menambah ilmu pengetahuan dalam ilmu komunikasi politik penulis maupun pembaca;
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi semua kalangan untuk melihat bagaimana perilaku pemilih mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum baik pemilihan presiden, kepala daerah ataupun legislatif sehingga untuk kedepannya perolehan suara dari masyarakat itu dapat ditingkatkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu adalah suatu sajian singkat hasil penelitian terdahulu dalam skripsi ini. Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Wiwindari 2012 tentang Partisipasi Politik Warga Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Desa Sukarami Kecamatan Air Nipis Di Kabupaten Bengkulu Selatan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana partisipasi politik warga desa sukarami dalam proses kegiatan pilkada kabupaten bengkulu selatan. Dan hasil dari penelitian ini adalah partisipasi politik warga desa sukarami dalam kegiatan penjangkaran calon masih rendah, tidak aktif. Itu disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan wawasan yang dimiliki sehingga keterlibatan mereka tentang kegiatan penjangkaran calon.

Selanjutnya penelitian terdahulu dilakukan oleh Dwita Martias Ningsih 2012 tentang Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Bengkulu Tengah Studi Perilaku Pemilih Di Kecamatan Taba Penanjung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku pemilih dalam partisipasi masyarakat yang terjadi di kabupaten bengkulu tengah, partisipasi masyarakat dilihat melalui ikut dalam pemungutan suara dan kampanye. Dan hasil dari penelitian ini adalah masyarakat taba penanjung memberikan suara bukan dalam bentuk partisipasi tetapi mobilisasi karena mereka memilih mendapatkan imbalan dan mencari keuntungan dari kandidat bupati dan wakil bupati bengkulu tengah.

Pada penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah berkurangnya perolehan suara atau partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota putaran kedua dan tujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku pemilih dengan empat pendekatan sosiologis, psikologis, rasional dan iklan kampanye di media cetak mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota di Kecamatan Pagaralam Utara Kota Pagaralam.

II.2 Kerangka Teori

II.2.1 Perilaku Pemilih (Voting Behavior)

Syarat – syarat menjadi pemilih di dalam Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

1. WNI yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin;
2. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
3. Terdaftar sebagai pemilih;
4. Bukan anggota TNI/Polri;
5. Tidak sedang dicabut hak pilihnya;
6. Terdaftar di DPT;
7. Khusus untuk Pemilu calon pemilih harus berdomisili sekurang kurangnya 6 (enam) bulan di daerah yang bersangkutan.

Selanjutnya, warga negara yang berhak memilih harus memenuhi syarat:

- 1). Warga negara mempunyai hak pilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Warga Negara Indonesia terdaftar oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilu lokal sehingga tercantum sebagai pemilih dalam daftar Pemilih tetap (DPT);
- 2). Warga yang berhak memilih di TPS adalah yang terdaftar dalam DPT;
- 3). Bagi pemilih dari TPS lain harus membawa surat keterangan pindah memilih seperti formulir A7 PPWP (surat pindah TPS) dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau surat keterangan pindah memilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Sumber: Berkas Sosialisasi KPU Provinsi Bengkulu).

Perilaku pemilih menurut Ramlan surbakti adalah aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih (*to vote or not to vote*) dalam suatu pemilihan umum, bila voters atau pemilih memutuskan untuk memilih maka akan memilih atau mendukung kandidat tertentu.

Perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertujuan untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara, setiap warga negara diwajibkan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam melakukan perilaku politik, contoh dari perilaku politik warga negara adalah melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin, mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik, ikut serta dalam pesta politik, ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas, berhak untuk menjadi pimpinan politik dan berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh undang-undang dasar dan perundangan hukum yang berlaku.

Pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama bagi para kandidat, untuk dipengaruhi dan diyakinkan agar mendukung dan memberikan suaranya kepada kandidat tersebut. Perilaku pemilih dapat ditujukan dalam pemberian suara dan menentukan siapa yang akan dipilih dalam pemilihan umum tersebut.

Perilaku pemilih berhubungan erat dengan ideologi antar pemilih dengan kandidat ataupun partai politik, para kandidat mempunyai ideologi masing-masing. Selama masa pencarian dukungan atau masa kampanye, timbul penilaian atau persamaan ideologi dari masyarakat terhadap ideologi yang dibawa oleh para kandidat, masyarakat akan mengelompokkan dirinya kepada kandidat yang memiliki ideologi yang sama seperti mereka dan menjauhkan diri dari ideologi yang tidak sama dengan mereka.

Penjelasan teoritis tentang perilaku pemilih atau *voting behavior* dianalisis dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan sosiologis, psikologis dan rasional (Asfar, 2006). Dan partisipasi politik sebagai tujuan komunikasi politik dimaksudkan agar individu-individu berperan serta dalam kegiatan politik (partisipasi politik). Bentuk partisipasi politik yang paling penting ialah khalayak memberikan suaranya kepada calon atau kandidat dan partai politik dalam pemilihan umum. Pembentukan pendapat umum dalam komunikasi politik ditentukan oleh peranan media. Media cetak koran, radio,

televisi dan lainnya selain memiliki fungsi memberi informasi, mendidik, menghubungkan dan menghibur, juga membentuk citra politisi dan pendapat umum yang merupakan dimensi penting dalam kehidupan politik (Anwar, 2003:113). Dalam melihat perilaku pemilih dari sudut media, media sebagai alat kampanye yang mempengaruhi khalayak atau para pemilih untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Oleh karena itu iklan kampanye di media cetak koran sebagai pendekatan untuk mengetahui perilaku pemilih dari sudut media terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota Kota Pagaralam.

II.2.2 Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis menjelaskan bahwa karakteristik sosial merupakan pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku pemilih. Karakteristik sosial seperti pekerjaan, pendidikan dan latar belakang sosiologis seperti agama, jenis kelamin serta umur. Perilaku pemilih pendekatan sosiologis menilai agama merupakan faktor yang sangat kuat dalam mempengaruhi sikap pemilih terhadap kandidat atau partai politik. Dalam hal ini, agama diukur dari keyakinan terhadap agama tertentu seperti Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha. Aspek kedaerahan mempunyai hubungan dengan perilaku pemilih, adanya rasa kedaerahan mempengaruhi dukungan seseorang terhadap partai politik atau kandidat tertentu, faktor agama dan aspek kedaerahan mempunyai hubungan nyata dalam membentuk perilaku pemilih. Didalam kehidupan masyarakat pengelompokan sosial seperti keanggotaan masyarakat dalam suatu organisasi keagamaan dan organisasi kedaerahan banyak terdapat didalam kehidupan bermasyarakat merupakan sesuatu yang penting didalam memahami perilaku seseorang karena kelompok-kelompok inilah mempunyai peranan dalam membentuk sikap, persepsi dan orientasi seseorang.

II.2.3 Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis lebih menekankan pada pengaruh faktor psikologis seseorang dalam menentukan perilaku politik, pendekatan psikologis mengembangkan konsep psikologi khususnya. Pendekatan psikologis ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologi terutama konsep sikap dan sosialisasi, untuk menjelaskan perilaku pemilih. Pendekatan ini pemilih menentukan pilihannya karena pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sebagai produk dari proses sosialisasi. Melalui proses sosialisasi kemudian berkembang ikatan psikologis yang kuat antara seseorang dengan organisasi kemasyarakatan atau partai politik.

Pendekatan psikologis menekankan pada tiga pokok psikologis sebagai kajian utama yaitu ikatan emosional pada suatu partai, terhadap isu-isu dan terhadap kandidat. Pendekatan ini dilandasi oleh konsep sikap dan sosialisasi, sikap seseorang sangat mempengaruhi perilaku politiknya, sikap itu terbentuk melalui sosialisasi yang berlangsung lama. Seorang calon pemilih telah menerima pengaruh politik dari orang tua dan keluarga dari seorang calon pemilih sejak kecil, baik dari komunikasi langsung maupun dari pandangan politik yang ditampilkan didalam keluarganya. Didalam pendekatan psikologis adanya identifikasi seseorang, identifikasi merupakan dorongan untuk menjadi identik atau sama dengan orang lain tanpa disadari, identifikasi dilakukan orang kepada orang lain yang dianggapnya ideal dalam suatu segi. Pemahaman seorang anak, identifikasi dengan orang tuannya bukan sekedar untuk menjadi seperti ayah dan ibu secara lahiriah, melainkan juga secara batiniah, maka semakin kuat pengaruh orang tua tersebut terhadap dirinya. Tujuannya untuk memperoleh sistem, norma, sikap, dan nilai yang dianggapnya ideal, hubungan sosial yang berlangsung pada identifikasi itu lebih mendalam, kuatnya pengaruh identifikasi terhadap perilaku pemilih berkaitan dengan fungsi sikap.

II.2.4 Pendekatan Rasional

Pendekatan rasional, pendekatan ini isu-isu politik menjadi pertimbangan penting. Para pemilih akan menentukan pilihan berdasarkan penilaiannya terhadap isu-isu politik dan kandidat yang diajukan. Artinya para pemilih dapat menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional. Dengan begitu, diasumsikan bahwa para pemilih mempunyai kemampuan untuk menilai isu-isu politik yang diajukan, maupun calon (kandidat) yang ditampilkan (Asfar, 2006). Dalam studi *voting behavior*, menurut Ramlan Surbakti pemilih rasional yang diadaptasi dari ilmu ekonomi ini menggunakan kalkulasi untung dan rugi dalam menentukan pilihan politiknya. Kalkulasi ini biasanya berkaitan dengan kandidat mana yang menawarkan program-program visi dan misi sesuai dengan referensi politiknya. Dan bahkan keuntungan secara langsung yang dirasakan oleh calon pemilih, sering kali menjadi faktor penentu pemilih untuk menentukan pilihan kepada kandidat, yang pada saat ini hal itu dikenal dengan istilah politik uang (*money politic*) yang dirasakan secara langsung keuntungannya oleh calon pemilih yang didapat dari suatu calon.

II.2.5 Pendekatan Iklan kampanye di Media Cetak

Iklan kampanye di dalam pemilihan umum diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2008 Paragraf 4 tentang Iklan kampanye Pasal 93 : (1) Iklan kampanye Pemilu dapat dilakukan oleh Peserta Pemilu pada media massa cetak dan/atau lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat. (2) Iklan kampanye Pemilu dilarang berisikan hal yang dapat mengganggu kenyamanan pembaca, pendengar, dan/atau pemirsa. (3) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu dalam pemuatan dan penayangan iklan kampanye. (4) Pengaturan dan penjadwalan pemuatan dan penayangan iklan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.

Dan pada Pasal 97 berbunyi Media massa cetak menyediakan halaman dan waktu yang adil dan seimbang untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan kampanye bagi peserta pemilu.

Komunikasi politik (political communication) merupakan komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara yang diperintah dan yang memerintah. Komunikasi politik juga sebagai suatu proses sosialisasi politik bagi anggota masyarakat yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam aktivitas komunikasi politik. Di era kemajuan zaman pada saat ini media merupakan alat komunikasi yang efektif untuk kepentingan politik kandidat calon pemimpin daerah, calon legislatif bahkan calon presiden karena media sangat berperan penting dalam berpolitik seperti pada saat kampanye untuk mendapat perhatian, dukungan serta menjatuhkan pilihan kepada suatu kandidat yang dipilih masyarakat atau calon pemilih pada saat pemilihan umum.

Fungsi dari media massa sebagai alat komunikasi politik adalah :

- a. Dapat digunakan sebagai partisipasi politik;
- b. Dapat digunakan sebagai alat kampanye bagi politisi;
- c. Memperbaharui informasi dalam dunia perpolitikan;
- d. Menyampaikan sebuah aspirasi.

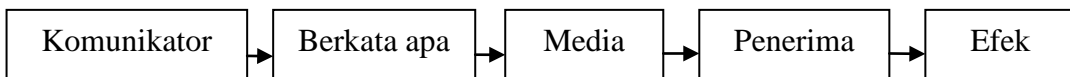
Beragam jenis-jenis media massa baik cetak maupun elektronik seperti, koran, radio, televisi, internet, dan lainnya kesemuanya itu sangat membantu komunikasi politik yang dilakukan para politisi atau orang-orang yang mencalonkan diri sebagai pemimpin suatu daerah.

Di dalam penelitian ini media yang dilihat adalah iklan kampanye yang terdapat di media cetak koran karena sajian berita koran atau surat kabar berbentuk kata tercetak di kertas bersifat praktis menjangkau semua kalangan dan dapat disimpan serta dibaca berulang-ulang. Dalam media cetak koran, sebuah berita besar atau yang menjadi topik utama selalu ditempatkan di halaman depan dengan judul yang menarik dan membuat penasaran ditambah dengan foto yang mendukung. Semakin sering iklan kampanye calon atau partai dimuat di halaman

tersebut, maka akan semakin dikenal oleh masyarakat. Kampanye politik melalui media merupakan salah satu hal yang paling sering dilakukan untuk mendapatkan dukungan atau suara pada pemilihan nantinya yang akan menimbulkan persepsi terhadap suatu calon dengan melihat iklan-iklan politik yang dihadapkannya.

II.2.5.1 Model Lasswell

Seorang ahli ilmu politik Amerika Serikat pada tahun 1948 mengemukakan suatu ungkapan yang sangat terkenal dalam teori dan penelitian komunikasi massa. Untuk memahami proses komunikasi massa adalah dengan menjawab pertanyaan *Who, Says What, in Which Channel, To Whom, With What Effect*



Gambar 2.1. Model Lasswell

(sumber: Rohim, 2009)

Model Laswell adalah proses komunikasi selalu mempunyai efek dan pengaruh terhadap khalayak, dalam model Lasswell ini ada lima unsur yang dibahas yaitu siapa (Komunikator), Berkata apa, melalui apa (media), kepada siapa (penerima) dan efek (dengan efek apa). Model Laswell sering diterapkan dalam komunikasi massa. Tipe komunikasi yang menggunakan ini adalah komunikasi massa karena komunikasi massa merupakan komunikasi yang mengutamakan saluran sebagai alat menyampaikan pesan komunikasi.

II.3 Pemilihan Umum

II.3.1 Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum dijelaskan oleh UU Nomor 10 Tentang Pemilihan umum Pasal 1 berbunyi: Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (huruf a pertimbangan UU Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007). Pemilihan umum merupakan proses demokrasi di dalam kehidupan bernegara, suatu hak dan kewajiban sebagai warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum.

II.3.2 Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dijelaskan dalam UU Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 4 berbunyi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II.3.3 Asas-Asas Pemilihan Umum

Asas-asas dalam pemilihan umum dalam UU No. 10 Tahun 2008. Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil).

1. Langsung

Langsung, artinya rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung dalam pemilu sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

2. Umum

Umum, artinya pemilu berlaku bagi semua warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial lainnya.

3. Bebas

Bebas, artinya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam pemilu, bebas menentukan siapa yang akan dipilih untuk mengemban aspirasinya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapa pun.

4. Rahasia

Rahasia, artinya dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

5. Jujur

Jujur, artinya semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Adil

Adil, artinya dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

II.3.4 Sistem Pemilihan Umum

Sistem pemilihan umum menurut Anwar Arifin (2003:134) yaitu sistem distrik dan sistem proporsional :

- a. Pemilihan Umum sistem distrik menunjuk kepada pertarungan antara kandidat yang dicalonkan oleh partai-partai dalam sebuah wilayah kecil (daerah pemilihan) untuk mencari satu wakil. Kandidat yang menang akan mewakili daerah itu dalam parlemen, dan suara kandidat yang kalah tidak diperhitungkan lagi. Jadi, suara itu dianggap hilang. Namun, kandidat yang menang tidak lagi mewakili partainya, tetapi mewakili daerah pemilihan itu dan harus memperjuangkan kepentingan-kepentingannya. Dalam pemilu sistem distrik, yang harus ditonjolkan dalam kampanye politik adalah program dan ketokohan kandidat. Artinya, yang akan dipilih oleh rakyat adalah program dan orang yang akan melaksanakan program itu. Itulah sebabnya, dalam distrik partai-partai politik yang mengikuti pemilu harus berusaha menampilkan program dan tokoh yang menarik dan disukai oleh rakyat.
- b. Pemilihan umum sistem proporsional menunjuk kepada pertarungan antara partai politik dalam sebuah daerah pemilihan yang besar untuk mencari beberapa orang wakil. Partai politik mencalonkan banyak kandidat dalam sebuah daftar dengan nomor urut dan rakyat tidak perlu

memilih nama, tetapi cukup dengan memilih anda gambar partai politik yang terdaftar atau kontestan. Suara yang diperoleh oleh setiap kontestan (partai politik) dihitung, kemudian setiap kontestan akan memperoleh jumlah kursi secara proporsional dengan suara yang diperoleh. Kandidat yang terpilih mewakili daerah itu ditetapkan berdasarkan nomor urut dari atas kebawah. Dalam hal ini tidak ada suara pemilih yang hilang. Dalam sistem proporsional yang harus ditonjolkan dalam kampanye politik adalah program partai dan ketokohan para kandidat karena dipilih oleh rakyat adalah tanda gambar partai. Justru itu, partai politik harus menampilkan program dan tokoh-tokoh (kandidat) yang menarik, disukai dan didukung oleh rakyat. Kelemahan dari sistem ini ialah kandidat yang memiliki ketokohan tidak terpilih karena namanya dalam daftar calon berada pada urutan bawah, sedang calon yang ada di urutan atas adalah justru kandidat yang kurang dikenal.

II.4 Perilaku Politik

II.4.1 Pengertian Perilaku Politik

Perilaku politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, diantara lembaga-lembaga pemerintah dan diantara kelompok dan individu dalam masyarakat, dalam rangka proses pembuatan pelaksanaan dan penegakan keputusan politik (Surbakti,1992:12). Perilaku politik adalah tindakan atau kegiatan seseorang atau kelompok dalam kegiatan politik. Menurut pendapat Ramlan Surbakti (1992:31) Perilaku politik adalah sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan keputusan politik.

Perilaku politik menurut Ramlan Surbakti (1992:15) dibagi dua, yaitu:

1. Perilaku politik lembaga dan para pejabat pemerintah yang bertanggung jawab membuat, melaksanakan dan menegakan keputusan politik.
2. Perilaku politik warga negara maupun individu kelompok yang berhak mempengaruhi pemerintah dalam melaksanakan fungsinya karena apa yang dilakukan pemerintah menyangkut kehidupan warga negara tersebut.

Tidak semua individu atau kelompok masyarakat itu mengerjakan kegiatan politik, karena ada pihak yang memerintah dan ada pula yang mentaati perintah, yang satu mempengaruhi dan yang lain menentang dan hasilnya berkompromi. Yang lain menjanjikan, yang lain kecewa karena janji tidak dipenuhi, berunding dan tawar menawar, yang satu memaksakan keputusan berhadapan dengan pihak lain yang mewakili kepentingan rakyat yang berusaha membebaskan. Yang satu menutupi kenyataan yang sebenarnya (yang merugikan masyarakat), sementara pihak lain berusaha memaparkan kenyataan yang sebenarnya dan mengajukan tuntutan, memperjuangkan kepentingan, mencemaskan apa yang terjadi.

Salah satu perilaku politik yang dilakukan masyarakat adalah dalam bentuk pemilihan umum. Dalam pemilihan umum masyarakat berpartisipasi untuk memilih para wakil rakyat yang akan memperjuangkan kepentingan mereka. Suatu tindakan dan keputusan politik tidak hanya ditentukan oleh fungsi (tugas dan wewenang) yang melekat pada lembaga yang mengeluarkan keputusan (sedangkan fungsi itu sendiri merupakan upaya mencapai tujuan masyarakat, negara atau nilai-nilai politik), tetapi juga dipengaruhi oleh kepribadian (keinginan atau dorongan, persepsi dan motivasi, sikap dan orientasi, harapan dan cita-cita, ketakutan dan pengalaman masa lalu) individu yang membuat keputusan tersebut (Surbakti, 1992 : 131).

Sikap dan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh kejadian pada masa lalu dan hal yang selalu diingat. Kejadian politik secara umum maupun yang dialami oleh individu atau kelompok masyarakat, baik yang menyangkut sistem politik atau ketidak stabilan politik, janji politik dari calon pemimpin atau calon wakil rakyat yang tidak pernah ditepati dapat mempengaruhi perilaku politik masyarakat.

II.4.2. Bentuk Bentuk Perilaku Politik

Perilaku politik merupakan hal yang dilihat untuk menilai bagaimana masyarakat menunjukkan keikutsertaannya didalam pemilihan umum yaitu diantaranya ikut didalam proses kampanye, memberikan hak suaranya atau menunjukkan keikutsertaannya didalam pemilihan umum Presiden, anggota legislatif ataupun pemilihan kepala daerah dan ikut mengawasi didalam penentuan pemenang didalam pemilihan tersebut.

Perilaku politik masyarakat meliputi kampanye, memberikan hak suara dan mengawasi penentuan pemenang didalam pemilihan umum;

II.4.2.1 Kampanye

Kampanye adalah sebuah tindakan yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha kampanye bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok, kampanye biasa juga dilakukan guna memengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian. Dalam sistem politik demokrasi, kampanye politis berdaya mengacu pada kampanye elektoral pencapaian dukungan, di mana wakil terpilih atau referenda diputuskan. Kampanye politis tindakan politik berupaya meliputi usaha terorganisir untuk mengubah kebijakan di dalam suatu institusi.

Kampanye politik adalah sebuah upaya yang terorganisir bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan para pemilih dan kampanye politik selalu merujuk pada kampanye pada pemilihan umum (Sumber: Wikipedia). Kampanye politik adalah periode yang diberikan oleh panitia pemilu kepada semua kontestan, baik partai politik atau perorangan, untuk memaparkan program-program kerja dan mempengaruhi opini publik sekaligus memobilisasi masyarakat agar memberikan suara kepada mereka sewaktu pencoblosan (Firmanzah, 2008:271).

Kampanye diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 Bab VIII Tentang kampanye Pasal 76 berbunyi Kampanye pemilu dilakukan dengan prinsip bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat. Pasal 77 berbunyi: (1) Kampanye pemilu dilaksanakan oleh

pelaksana kampanye. (2) Kampanye pemilu diikuti oleh peserta kampanye (3) Kampanye pemilu didukung oleh petugas kampanye.

Untuk materi kampanye dijelaskan pada pasal 80 berbunyi : (1) Materi kampanye partai politik peserta pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota meliputi visi, misi dan program partai politik. (2) Materi kampanye perseorangan peserta pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD meliputi visi, misi dan program yang bersangkutan.

Metode kampanye dijelaskan dalam pasal 81 yang berbunyi : Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 dapat dilakukan melalui : a. Pertemuan terbatas; b. Pertemuan tatap muka; c. Media massa cetak dan media massa elektronik; d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum; e. Pemasangan alat peraga di tempat umum; f. Rapat umum; dan g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan.

Larangan dalam kampanye diatur dalam pasal 84 yang berbunyi :

(1) Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang:

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. Mengganggu ketertiban umum;
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- g. merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;

- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan;
 - j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Ketua, Wakil Ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
 - b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. Gubernur, Deputy Senior dan Deputy Gubernur Bank Indonesia;
 - d. pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. pegawai negeri sipil;
 - f. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. kepala desa;
 - h. perangkat desa;
 - i. anggota badan permusyawaratan desa; dan
 - j. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
- (3). Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a sampai dengan huruf i dilarang ikut serta sebagai pelaksana kampanye
- (4) Sebagai peserta kampanye, pegawai negeri sipil dilarang menggunakan atribut partai atau atribut pegawai negeri sipil
- (5) Sebagai peserta kampanye, pegawai negeri sipil dilarang mengerahkan pegawai negeri sipil dilikngkungan kerjanya dan dilarang menggunakan fasilitas negara.
- (6) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat 1 huruf c, huruf f, huruf g. Huruf i, dan huruf j, ayat 2 dan ayat 5 merupakan tindak pidana pemilu.

Partai politik memasarkan kandidat agar dapat dikenal dan dipilih oleh masyarakat. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilu termasuk mengajak memilih kandidat atau partai tertentu. Kampanye pemilu adalah kampanye jangka pendek menjelang pemilu untuk mengingatkan, membentuk dan mengarahkan opini publik dalam waktu singkat. Pesan dari kampanye adalah penonjolan ide bahwa sang kandidat atau calon ingin berbagi dengan pemilih. Pesan sering terdiri dari beberapa poin berbicara tentang isu-isu kebijakan. Poin-poin ini akan dirangkum dari ide utama dari kampanye dan sering diulang untuk menciptakan kesan abadi kepada pemilih. Pasal 76 UU No. 10 Tahun 2008 yang berbunyi bahwa kampanye pemilu dilaksanakan dengan prinsip bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat. Kampanye dilihat sebagai hal yang sangat esensial dalam pemilu yang dilaksanakan oleh pelaksana kampanye yang dibentuk oleh peserta pemilu, didukung oleh petugas kampanye yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye, sedangkan peserta terdiri atas anggota masyarakat.

Ada dua jenis kampanye, pertama kampanye menjelang Pemilu *short term* kampanye ini digunakan sebagai ajang kompetisi jangka pendek menjelang pemilu untuk mengingatkan, membentuk dan mengarahkan opini publik dalam waktu yang singkat. Kedua kampanye yang bersifat permanen dan berjangka panjang. Kampanye jenis ini tidak hanya dilakukan menjelang pemilu namun harus dilakukan terus menerus oleh partai politik. Pembentukan image positif harus dilakukan melalui semua aktivitas pelayanan publik dalam jangka panjang akan tertanam dalam benak masyarakat. Menurut Lock dan Harris (1996) kampanye politik terkait erat dengan pembentukan image politik. Dalam kampanye politik terdapat dua hubungan yang akan dibangun, yaitu internal dan eksternal. Hubungan internal adalah suatu proses antara anggota-anggota partai dengan pendukung untuk memperkuat ikatan ideologis dan identitas mereka. Sementara hubungan eksternal dilakukan untuk mengkomunikasikan image yang akan

dibangun kepada pihak luar partai, termasuk media massa dan masyarakat secara luas (firmanzah, 2008:275). Masyarakat atau individu yang terlibat dalam proses kampanye suatu calon merupakan masyarakat atau individu yang menunjukkan keikutsertaannya dalam proses pemilu atau menunjukkan perilaku politiknya.

Berdasarkan definisi kampanye politik yang telah dijabarkan, kampanye politik yang dilakukan kandidat Pemilukada bertujuan untuk membentuk *image* politik dengan cara mengkomunikasikan ideologi-ideologi politiknya dalam merubah kondisi masyarakat sehingga pada akhirnya masyarakat memiliki preferensi terhadap calon kandidat peserta Pemilukada.

II.4.2.2 Memberikan Hak Suara

Memberikan hak suara didalam pemilihan umum adalah pokok dari partisipasi politik warga negara. Didalam pemberian suara atau *vote* ini akan membuktikan keikutsertaan masyarakat didalam pemilihan umum apakah keikutsertaan masyarakat akan besar atau kecil didalam memberikan hak suaranya ditempat pemungutan suara di pemukiman mereka. Pemberian hak suara dari pemilih ini yang seharusnya menjadi acuan agar besarnya keikutsertaan masyarakat didalam pemilihan yaitu penyuluhan sosialisasi tentang wajibnya ikut serta didalam pemilu, pendekatan ini menggunakan bentuk dari jiwa atau sikap, untuk menjelaskan perilaku seseorang agar tumbuh didalam dirinya. Pemilih menentukan pilihannya karena pengaruh kekuatan psikologis dirinya yang tumbuh dari sosialisasi atau penyuluhan tentang wajibnya warga negara ikut serta didalam pemilu. Sosialisasi politik atau penyuluhan politik ini penting bagi para pemilih pemula yang belum pernah ikut didalam pemilihan umum ataupun baik dari semua kalangan masyarakat. Sosialisasi politik ini harus dilakukan secara baik dan benar agar para kalangan masyarakat mengerti dan memunculkan minat didalam partisipasi politik. Kesadaran politik warga negara menjadi pokok penting dalam partisipasi politik, kesadaran hak dan kewajiban warga negara yang

berhubungan dengan kegiatan politik menjadi alasan penting agar warga negara terlibat dalam partisipasi politik.

II.4.2.3 Mengawasi penentuan pemenang didalam Pemilihan Umum Kepala Daerah

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban didalam aktivitas politik karena Negara Indonesia adalah negara demokrasi. Setelah berpartisipasi didalam pemilihan umum, masyarakat berhak untuk mengawasi keputusan hasil dari pemilihan umum tersebut, adapun peraturan tersebut diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh panitia pemilihan kecamatan, komisi pemilihan umum kabupaten/kota, dan komisi pemilihan umum provinsi, serta penetapan calon terpilih, pengesahan, pengangkatan dan pelantikan. Memperhatikan: keputusan rapat pleno komisi pemilihan umum tanggal 20 mei 2010; Memutuskan : Menetapkan : peraturan komisi pemilihan umum tentang pedoman tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh panitia pemilihan kecamatan, komisi pemilihan umum kabupaten/kota, dan komisi pemilihan umum provinsi, serta penetapan calon terpilih, pengesahan, pengangkatan, dan pelantikan. Didalam Bab I berisi tentang Ketentuan Umum Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

3. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota di wilayah Aceh adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPSS, adalah penyelenggara Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tingkat Kecamatan, Desa/ Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara.
5. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat memilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
6. Partai politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Gabungan Partai Politik adalah dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
8. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.
9. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan adalah Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.
10. Kotak suara dan bilik suara adalah kotak suara dan bilik suara yang digunakan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
11. Saksi adalah Saksi Pasangan Calon, yaitu seorang yang ditunjuk dan atau diberi mandat secara tertulis dari pasangan calon/tim kampanye untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.

12. Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/ Kota.

Didalam Bab VII berisi tentang penetapan calon terpilih, pengesahan pengangkatan dan pelantikan bagian kesatu penetapan calon terpilih dan pengesahan pengangkatan pasal 46 yang berisi :

- (1) Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua.
- (5) Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dua pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut berhak mengikuti pemilihan putaran kedua.
- (6) Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh tiga pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (7) Apabila pemenang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh lebih dari satu pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (8) Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

II.5 Partisipasi Politik

II.5.1 Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya (Surbakti, 1992:140). Partisipasi politik adalah keterlibatan atau keikutsertaan seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab didalamnya, partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk dari proses demokrasi. Keinginan ini menjadi sangat penting bagi masyarakat dalam proses pembangunan politik bagi negara Indonesia, karena didalamnya ada hak dan kewajiban masyarakat yang dapat dilakukan salah satunya adalah berlangsung dimana proses pemilihan kepala negara sampai dengan kepala daerah yaitu pemilihan walikota dan bupati dilakukan secara langsung. Sistem ini membuat kesempatan dan membawa masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses tersebut.

Berdasarkan definisi ini, partisipasi warga masyarakat menekankan pada keikutsertaan individu maupun kelompok masyarakat untuk melakukan kegiatan politik secara aktif. Menurut Miriam Budiardjo partisipasi politik secara umum didefinisikan sebagai bentuk kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (Budiardjo, 2008). Gabriel Almond (2004:26), berpendapat bahwa yang dinamakan partisipasi politik hanya terbatas pada kegiatan sukarela saja yaitu: kegiatan yang dilakukan tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun. Norman H. Nie (2002:9), dan Sidney Verba partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang loyal sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara/tindakan-tindakan diambil oleh mereka, yang teropong terutama adalah “tindakan-tindakan yang bertujuan mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah” yaitu usaha-usaha untuk mempengaruhi alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat.

Di dalam negara-negara demokrasi pada dasarnya semakin tinggi partisipasi masyarakat atau partisipasi warga negara maka semakin baik pula negara tersebut, karena masyarakat merasa bertanggung jawab untuk berpartisipasi, hal ini masyarakat memiliki tanggung jawab dan berperan terhadap setiap kebijakan atau peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Dan begitu juga bila tingkat partisipasi masyarakatnya rendah maka tidak baik suatu negara demokrasi tersebut, karena warga negaranya tidak peduli terhadap negaranya dan cenderung bersikap apatis dan lebih mementingkan kepentingan pribadinya. Partisipasi politik menekankan dalam beberapa hal yaitu: 1) Keikutsertaan warga masyarakat memberikan hal suara dalam pemilihan suka rela, 2) Sikap warga masyarakat terhadap pemimpin, 3) Perilaku warga masyarakat dalam kegiatan politik, dan 4) Kerjasama antara anggota masyarakat dengan pemimpin dalam mempengaruhi keputusan politik.

Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat (Pasal 244 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 2008). Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, dan penghitungan cepat hasil Pemilu, dengan ketentuan:

- a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu.
- b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu.
- c. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas.
- d. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai tertib dan lancar.

II.5.2 Kategori, Bentuk dan Tingkat Partisipasi Politik

Partisipasi politik Milbrath dan Goel (Surbakti, 1992:143) membedakan partisipasi politik pemilihan umum menjadi beberapa kategori perilaku yaitu:

1. *Apatis*, adalah orang-orang yang menarik diri dari proses politik dan bersikap masa bodoh;

2. *Spectator*, adalah berupa orang-orang yang setidaknya pernah ikut didalam pemilu;
3. *Gladiator*, adalah orang-orang yang selalu aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai, pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat.
4. *Pengkritik*, yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk tidak konvensional atau suatu bentuk partisipasi politik yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi normal, bahkan dapat berupa kegiatan ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner.

Bentuk partisipasi politik menurut Gabriel Almond dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk konvensional dan bentuk nonkonvensional.

a. Bentuk konvensional (Partisipasi politik biasa)

Bentuk konvensional antara lain:

- 1) pemberian suara (voting), 2) diskusi kelompok, 3) kegiatan kampanye,
- 4) membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, 5) komunikasi individual dengan pejabat politik/administratif, 6) pengajuan petisi.

b. Bentuk nonkonvensional (Partisipasi politik yang tidak biasa)

Bentuk nonkonvensional antara lain:

- 1) berdemonstrasi, 2) konfrontasi, 3) dengan pemogokan, 4) tindakan kekerasan politik terhadap harta benda, perusakan, pemboman dan pembakaran, 5) tindak kekerasan politik manusia penculikan/pembunuhan, 6) dengan perang gerilya/revolusi.

Sedangkan Ramlan Surbakti menyatakan bahwa tingkat partisipasi politik warga Negara dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi aktif dan pasif.

a. Partisipasi aktif

Partisipasi aktif yaitu kegiatan warga negara dalam ikut serta menentukan kebijakan dan pemilihan pejabat pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi kepentingan bersama. Bentuk partisipasi aktif antara lain mengajukan usulan tentang suatu kebijakan, mengajukan saran dan kritik tentang suatu kebijakan tertentu, dan ikut partai politik.

b. Partisipasi pasif

Partisipasi pasif yaitu kegiatan warga negara yang mendukung jalannya pemerintahan negara dalam rangka menciptakan kehidupan negara yang sesuai tujuan. Bentuk partisipasi pasif antara lain menaati peraturan yang berlaku dan melaksanakan kebijakan pemerintah.

II.6 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan logis sebagai kemungkinan pemecahan masalah yang hanya dapat diterima kebenaran bilamana setelah diuji ternyata fakta-fakta atau kenyataan-kenyataan sesuai dengan tersebut (Nawawi, 1990:161)

1. Hipotesis Alternatif (Ha)

(X1) Ada pengaruh yang signifikan antara perilaku pemilih pendekatan sosiologis terhadap partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dalam Pemilihan Walikota Pagar Alam putaran kedua.

(X2) Ada pengaruh yang signifikan antara perilaku pemilih pendekatan psikologis terhadap partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagaralam dalam Pemilihan Walikota Pagar Alam putaran kedua.

(X3) Ada pengaruh yang signifikan antara perilaku pemilih pendekatan rasional terhadap partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Pagaralam Utara Kota Pagar Alam dalam Pemilihan Walikota Pagar Alam putaran kedua.

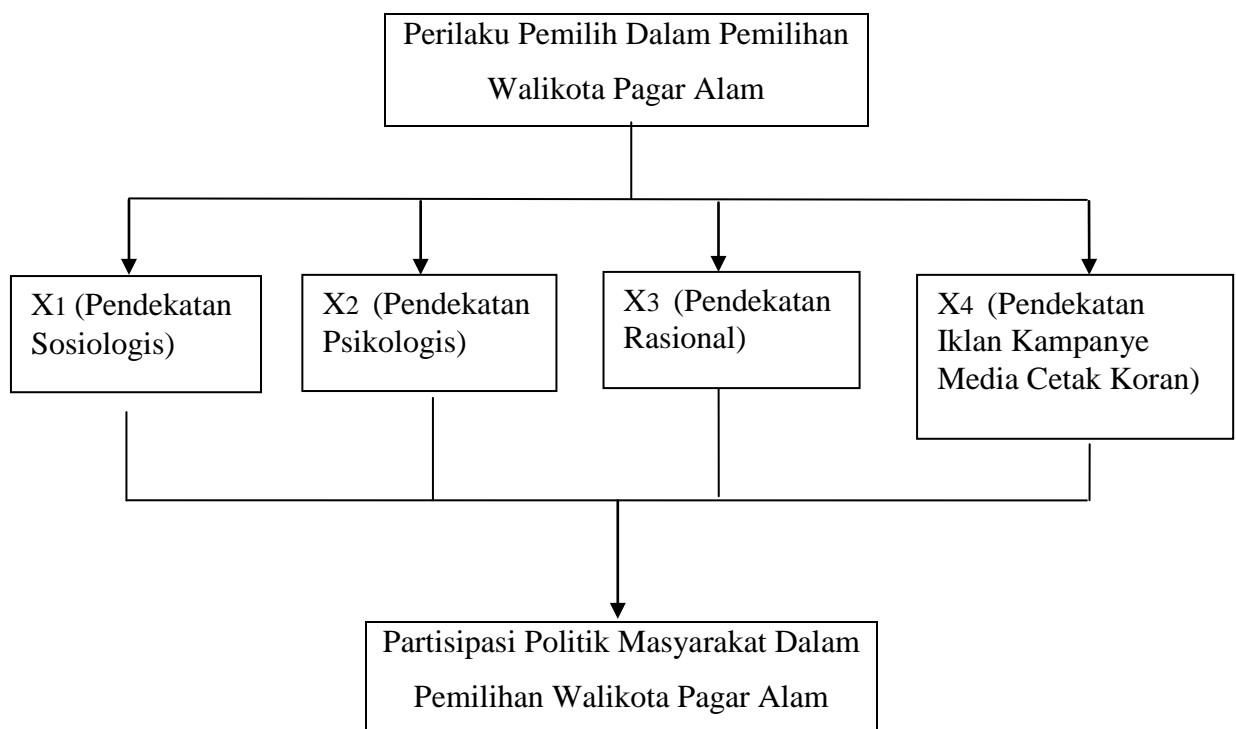
(X4) Ada pengaruh yang signifikan antara perilaku pemilih pendekatan iklan kampanye di media cetak terhadap partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dalam Pemilihan Walikota Pagar Alam putaran kedua.

2. Hipotesis Nol (H_0)

- (X1) Tidak ada pengaruh yang signifikan antara perilaku pemilih pendekatan sosiologis terhadap partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dalam Pemilihan Walikota Pagar Alam putaran kedua.
- (X2) Tidak ada pengaruh yang signifikan antara perilaku pemilih pendekatan psikologis terhadap partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dalam Pemilihan Walikota Pagar Alam putaran kedua.
- (X3) Tidak ada pengaruh yang signifikan antara perilaku pemilih pendekatan rasional terhadap partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dalam Pemilihan Walikota Pagar Alam putaran kedua.
- (X4) Tidak ada pengaruh yang signifikan antara perilaku pemilih pendekatan iklan kampanye di media cetak terhadap partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dalam Pemilihan Walikota Pagar Alam putaran kedua.

II.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh perilaku pemilih (*voting behavior*) dianalisis dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan sosiologis, psikologis, rasional dan iklan kampanye di media cetak sebagai pendekatan untuk melihat pengaruh perilaku pemilih dari sudut media. Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini dapat di lihat dalam bagan sebagai berikut :



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

III.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif, menurut Sugiyono (2008:257) bahwa metode kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan kuesioner sebagai instrument utama pengumpulan datanya. Tujuannya untuk memperoleh informasi tentang sejumlah responden yang dianggap mewakili populasi tertentu. Penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik, teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner dan analisis uji regresi merupakan instrument utama dalam melihat pengaruh perilaku pemilih terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota Kota Pagaralam putaran kedua.

III.2 Variabel Penelitian

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008:38).

Dalam penelitian ini ada terdapat dua variabel, yaitu:

1. Variabel independen atau variabel bebas yang mempengaruhi secara langsung terikat. Dalam penelitian ini variabel pengaruh yaitu perilaku pemilih yang dilihat oleh empat pendekatan yaitu (X1) sosiologis, (X2) psikologis, (X3) rasional dan (X4) iklan kampanye di media cetak koran.
2. Variabel dependen atau variabel terikat mendapat pengaruh dari variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terpengaruh (Y) adalah partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan walikota kota pagaralam putaran kedua.

III.3 Definisi Konseptual

Perilaku pemilih menurut Ramlan surbakti adalah aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih (*to vote or not to vote*) dalam suatu pemilihan umum, bila voters atau pemilih memutuskan untuk memilih maka akan memilih atau mendukung kandidat tertentu.

Secara konseptual masing-masing variabel didalam penelitian ini didefinisikan sebagai berikut :

1. (X₁) Pendekatan sosiologis adalah Pendekatan yang menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku pemilih. Karakteristik sosial seperti pekerjaan, pendidikan, karakteristik latar belakang sosiologis seperti agama, jenis kelamin dan umur serta kelompok-kelompok etnis yang meliputi ras, dan daerah asal.
- (X₂) Pendekatan psikologis adalah Pendekatan yang lebih menekankan pada pengaruh faktor psikologis seseorang dalam menentukan perilaku politik, pendekatan psikologi mengembangkan konsep psikologi khususnya. Pendekatan psikologis menekankan pada tiga pokok psikologis sebagai kajian utama yaitu ikatan emosional pada suatu partai, terhadap isu-isu dan terhadap kandidat/calon serta identifikasi terhadap orang tua.
- (X₃) Pendekatan rasional adalah pendekatan yang menilai isu-isu politik menjadi pertimbangan penting. Para pemilih akan menentukan pilihan berdasarkan penilainnya terhadap isu-isu politik dan kandidat yang diajukan, dengan mempertimbangkan perhitungan untung rugi dalam menentukan pilihan politiknya.
- (X₄) Iklan kampanye di media cetak koran sebagai referensi menentukan pilihan. Di era yang kemajuan media yang pesat pada saat ini membuat para politisi atau para calon pejabat pemerintahan

menggunakan media sebagai alat kampanye nya. Media digunakan sebagai alat kampanye bagi politisi dan memperbaharui informasi dalam dunia perpolitikan, iklan kampanye yang dihadirkan para calon didalam media koran biasanya berisi tentang ringkasan visi dan misi ataupun jargon (kata-kata andalan) yang dihadirkan untuk menarik perhatian para pemilih sehingga pemilih mungkin akan menjatuhkan pilihannya kepada calon yang menghadirkan kampanye nya di media cetak koran.

2. Partisipasi politik adalah bentuk kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara. Dalam hal ini memilih walikota dan wakil walikota dalam pilwakot kota pagaralam.

III.4 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah konsep abstrak yang menjadi konsep yang dapat diamati dan diukur. Salah satu unsur yang membantu komunikasi antar peneliti adalah definisi opsional yang merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur (Rahmat, 1995:12).

Adapun pengukuran masing-masing variabel tersebut berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut :

1. Variabel pengaruh (X) adalah perilaku pemilih dengan pendekatan sebagai berikut :

(X₁) Pendekatan sosiologis

- Agama
- Pendidikan
- Pekerjaan
- Jenis kelamin
- Umur
- Kelompok etnis meliputi suku dan daerah asal

(X₂) Pendekatan psikologis

- Kedekatan kekerabatan dengan suatu calon

- Identifikasi terhadap keluarga/orang tua
- (X₃) Pendekatan rasional
 - Memilih karena mendapatkan keuntungan
 - Penilaian terhadap visi dan misi serta program kerja para calon
- (X₄) Iklan kampanye di media cetak koran sebagai referensi menentukan pilihan
 - Melihat dan membaca iklan kampanye calon di media cetak koran
 - Menentukan pilihan berdasarkan iklan kampanye
- 2. Variabel terpengaruh (Y) partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan walikota kota pagar alam dilihat dari:
 - Partisipasi dalam memberikan hak suara
 - Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara
 - Partisipasi dalam proses kampanye para calon
 - Mengawasi penentuan pemenang

III.5 Populasi dan Sampel

III.5.1 Populasi

Populasi adalah kumpulan objek yang akan dijadikan sasaran penelitian (Rahmat, 1995:78). Sedangkan menurut Sugiyono (2008:90) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat atau penduduk di Kota Pagaralam yang berdomisili di Kecamatan Pagaralam Utara yang masuk kedalam Daftar Pemilih Tetap untuk pemilihan Walikota Pagaralam putaran kedua, daftar pemilih tetap pada Kecamatan Pagaralam Utara berjumlah 29.337 pemilih.

III.5.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono,2008:91). Setelah populasi dirumuskan, lalu selanjutnya menetapkan sampel penelitian, pengambilan sampel dimaksudkan untuk mewakili populasi. Untuk menentukan jumlah sampel, Burhan Bungin didalam bukunya metode penelitian kuantitatif (2005:105) bahwa ukuran sampel dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel yang dicari

N = Jumlah populasi

d = Nilai presisi (0,1 atau 10%, dengan derajat kepercayaan 90%)

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kecamatan Pagaralam Utara Kota Pagaralam berjumlah 29.337 pemilih, maka sampel yang diambil :

$$n = \frac{29.337}{29.337 \times (0,01) + 1}$$

$$n = \frac{29.337}{293,37 + 1}$$

$$n = \frac{29.337}{294,37}$$

$$n = 99,66$$

Berdasarkan hasil dari perhitungan sampel berjumlah 99,66 maka penelitian ini sampelnya dijadikan 100 sampel.

III.6 Teknik Sampling

Teknik sampling merupakan suatu cara pengambilan sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik sampling yaitu *random sampling* atau sampel acak. Random sampling adalah pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam

populasi (Sugiyono,2008:93). Populasi didalam penelitian ini adalah masyarakat di Kecamatan Pagaralam Utara yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap untuk Pemilihan Walikota Pagaralam, keseluruhan populasi dapat dijadikan sampel dalam penelitian karena seluruh populasi memiliki kesempatan yang sama tanpa melihat faktor-faktor tertentu.

III.7 Kriteria Pengukuran dan Skoring

Skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala nominal yaitu skala pengukuran yang menyatakan kategori atau kelompok dari suatu subjek. Kriteria pengukuran dan skoring di dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan skala likert, yaitu responden diberikan pertanyaan kemudian diminta untuk memberikan jawaban sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Menurut Sugiono (2008) Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

Kategori jawaban untuk masing-masing variabel adalah sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah dengan alternatif jawaban yang diberikan responden yaitu sangat setuju (ss), setuju (s), netral (n), tidak setuju (ts) dan sangat tidak setuju (sts). Berdasarkan kriteria tersebut, maka pemberian skornya adalah berikut :

- Jika responden menjawab ss diberi kategori sangat tinggi, maka diberi skor 5;
- Jika responden menjawab s diberi kategori tinggi, maka diberi skor 4;
- Jika responden menjawab n diberi kategori sedang, maka diberi skor 3;
- Jika responden menjawab ts diberi kategori rendah, maka diberi skor 2;
- Jika responden menjawab st diberi kategori sangat rendah, maka diberi skor 1.

Apabila pernyataan tersebut negatif maka akan berbanding terbalik dengan skoring pernyataan positif diatas.

- Jika responden menjawab ss diberi kategori sangat rendah, maka diberi skor 1;
- Jika responden menjawab s diberi kategori rendah, maka diberi skor 2;
- Jika responden menjawab n diberi kategori sedang, maka diberi skor 3;
- Jika responden menjawab ts diberi kategori tinggi, maka diberi skor 4;
- Jika responden menjawab sts diberi kategori sangat tinggi, maka diberi skor 5.

Instrumen dalam penelitian yang menggunakan Skala Likert. Skala Likert dapat dibuat dalam bentuk cheklist ataupun pilihan ganda.

Skor yang telah dijumlahkan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Dari jumlah tersebut akan tersusun skala interval dengan rumus:

$$I = \frac{\text{nilai tertinggi} - \text{nilai terendah}}{\text{kategori}}$$

Ukuran interval adalah mengurutkan orang atau objek berdasarkan atribut. Skala dan indeks sikap biasanya menghasilkan ukuran yang interval (Singarimbun,1995:103). Berdasarkan jawaban yang diberikan responden dalam setiap variabel maka akan diketahui jumlah skor atau nilai sebagai berikut :

Untuk mengukur variabel X ada delapan pertanyaan, dari delapan pertanyaan tersebut dikelompokkan menjadi pertanyaan 1-2 pendekatan sosiologis (X_1), 3-4 pendekatan psikologis (X_2), 5-6 pendekatan rasional (X_3) dan 7-8 iklan kampanye di media cetak koran (X_4)

1. Untuk mengukur variabel pendekatan sosiologis (X_1) ada dua pertanyaan, sehingga skor maksimal variabel adalah 10 dengan kriteria sebagai berikut :

- | | |
|---|------|
| - Sangat Tinggi apabila total skor mencapai | 9-10 |
| - Tinggi apabila total skor mencapai | 7-8 |
| - Sedang apabila total skor mencapai | 5-6 |
| - Rendah apabila total skor mencapai | 3-4 |

- Sangat Rendah apabila total skor mencapai 1-2
2. Untuk mengukur variabel pendekatan psikologis (X_2) ada dua pertanyaan, sehingga skor maksimal variabel adalah 10 dengan kriteria sebagai berikut :
- Sangat Tinggi apabila total skor mencapai 9-10
 - Tinggi apabila total skor mencapai 7-8
 - Sedang apabila total skor mencapai 5-6
 - Rendah apabila total skor mencapai 3-4
 - Sangat Rendah apabila total skor mencapai 1-2
3. Untuk mengukur variabel pendekatan rasional (X_3) ada dua pertanyaan, sehingga skor maksimal variabel adalah 10 dengan kriteria sebagai berikut :
- Sangat Tinggi apabila total skor mencapai 9-10
 - Tinggi apabila total skor mencapai 7-8
 - Sedang apabila total skor mencapai 5-6
 - Rendah apabila total skor mencapai 3-4
 - Sangat Rendah apabila total skor mencapai 1-2
4. Untuk mengukur variabel pendekatan iklan kampanye di media cetak koran (X_4) ada dua pertanyaan, sehingga skor maksimal variabel adalah 10 dengan kriteria sebagai berikut :
- Sangat Tinggi apabila total skor mencapai 9-10
 - Tinggi apabila total skor mencapai 7-8
 - Sedang apabila total skor mencapai 5-6
 - Rendah apabila total skor mencapai 3-4
 - Sangat Rendah apabila total skor mencapai 1-2

Untuk menentukan kategori perilaku pemilih, jika pertanyaan nomor 1-2 lebih besar skornya dari pertanyaan nomor 3-8 berarti responden tersebut termasuk kategori pendekatan sosiologis, dan begitu juga yang lainnya dalam menentukan kategori.

5. Untuk mengukur variabel (Y) partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan walikota kota pagaralam putaran kedua digunakan delapan pertanyaan, sebagai berikut :

- Sangat Tinggi apabila total skor mencapai 36-42
- Tinggi apabila total skor mencapai 29-35
- Sedang apabila total skor mencapai 22-28
- Rendah apabila total skor mencapai 15-21
- Sangat rendah apabila total skor mencapai 8-14

Untuk menentukan kategori partisipasi politik masyarakat, yang termasuk kategori sangat aktif jika total skor responden dari 36-42, kategori aktif jika total skor responden dari 29-35, kategori cukup aktif jika total skor responden dari 22-28, kategori tidak aktif jika total skor 15-21 dan kategori sangat tidak aktif jika total skor 8-14.

III.8 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2008:156) data sekunder juga bisa didapat dari literatur yang sesuai dengan penelitian.

Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang cukup luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara

langsung atau dikirim melalui pos atau internet, agar kuesioner dijawab dan diisi oleh responden (Sugiyono, 2008:162).

Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti agar mendapatkan informasi dari responden dengan cara bertanya langsung berpandu kepada pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner.

Dokumenter

Dokumenter atau pengumpulan data dari buku-buku referensi, dokumen atau arsip-arsip dari Komisi Pemilihan Umum Kota Pagaram dan dari peraturan-peraturan atau pasal-pasal dalam undang-undang.

III.9 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif karena datanya berupa angka-angka. Analisis regresi didalam penelitian ini menggunakan uji regresi berganda yang artinya alat analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan kausal antara dua variabel bebas atau lebih. Persamaan regresi ganda dengan empat variabel bebas dirumuskan :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4$$

Untuk mencari koefisien regresi digunakan persamaan dengan rumus :

$$\sum Y = a.n + b_1 \sum X_1 + b_2 \sum X_2 + b_3 \sum X_3 + b_4 \sum X_4$$

$$\sum X_1 Y = b_1 \sum X_1^2 + b_2 \sum X_1 X_2 + b_3 \sum X_1 X_3 + b_4 \sum X_1 X_4$$

$$\sum X_2 Y = b_1 \sum X_1 X_2 + b_2 \sum X_2^2 + b_3 \sum X_2 X_3 + b_4 \sum X_2 X_4$$

$$\sum X_3 Y = b_1 \sum X_1 X_3 + b_2 \sum X_2 X_3 + b_3 \sum X_3^2 + b_4 \sum X_3 X_4$$

$$\sum X_4 Y = b_1 \sum X_1 X_4 + b_2 \sum X_2 X_4 + b_3 \sum X_3 X_4 + b_4 \sum X_4^2$$

$$A = Y - b_1 X_1 - b_2 X_2 - b_3 X_3 - b_4 X_4$$

Korelasi ganda empat prediktor dengan rumus :

$$R (X_1, X_2, X_3, X_4) y = \sqrt{\frac{b_1 \sum X_1 y + b_2 \sum X_2 y + b_3 \sum X_3 y + b_4 \sum X_4 y}{\sum y^2}}$$

Untuk mencari nilai determinan korelasi antara kedua variabel dengan rumus :

$$KP = R^2 \cdot 100\%$$

Keterangan :

KP : Koefisien determinasi/Penentu

R : Koefisien korelasi

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh keseluruhan antar variabel-variabel digunakan uji signifikansi koefisien korelasi ganda, dengan rumus :

$$F = \frac{R^2 (n-m-1)}{m (1-R^2)}$$

Keterangan:

R : Koefisien korelasi antara X dan Y

n : Jumlah sampel

m : Jumlah variabel bebas

Untuk menguji apakah hipotesis diterima atau ditolak maka hasil F_{hitung} dikonsultasikan dengan F_{tabel} pada tingkat α (alpha) 5% jika :

- $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka hipotesis alternatif (H_a) diterima dan Hipotesis nol (H_o) ditolak.
- $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka hipotesis alternatif (H_a) ditolak dan hipotesis nol (H_o) diterima.

Sedangkan untuk mengetahui sigifikansi pengaruh masing-masing variabel X terhadap variabel Y, digunakan uji t_{test} , dengan rumus :

$$t_{test} = \frac{b}{Sb}$$

Keterangan :

b : Koefisien regresi

Sb : Standar error/standar baku

Untuk menguji apakah hipotesis diterima atau ditolak maka hasil t_{hitung} dikonsultasikan dengan t_{tabel} pada tingkat α (alpha) 5% jika :

- $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka hipotesis alternatif (H_a) diterima dan hipotesis nol (H_0) ditolak.
- $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka hipotesis alternatif (H_a) ditolak dan hipotesis nol (H_0) diterima.